

Implementasi Program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akademik dan Memenuhi Syarat Pencapaian Gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Administrasi Negara



Oleh:

**ADJENG VIERLYANA PUTERI
NBI 1112000086**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	18
2.2.1 Kebijakan Publik.....	18
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik	18
2.2.3 Implementasi Program.....	20
2.2.4 Program <i>Open Defecation Free</i> (ODF).....	21
2.3 Kerangka Konseptual	22
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian	23
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Sumber Data	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6 Teknik Analisis Data	25
DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prevalensi Angka Stunting di Indonesia Tahun 2022	7
Tabel 1.2 Angka Stunting di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020-2023	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	5
Gambar 1.2 Prevalensi Angka Stunting di Indonesia Tahun 2018-2022	6
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut B. Milles, Huberman, dan Saldana	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan merupakan salah satu alat untuk dapat mengatur, memperbaiki, dan menyelesaikan beberapa sistem yang ada di negara. Pembentukan kebijakan berawal mula dengan adanya suatu permasalahan sosial yang memberikan dampak buruk. Bentuk permasalahan publik di Indonesia hingga saat ini sangat mudah kita temukan dan rasakan di berbagai sektor, sehingga hal tersebut sebagai salah satu bentuk tantangan dan dorongan bagi pemerintah Indonesia dengan mengedepankan pembuatan kebijakan publik (Mawaza & Khalil, 2020). Pernyataan oleh Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa di Sidang Kabinet Paripurna (Jakarta, 16 Februari 2022), bahwasanya penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dalam menentukan kebijakan prioritas yaitu terdiri dari penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM sektor pendidikan dan kesehatan, pengentasan pengangguran, mendorong sektor dunia usaha dan sektor ekonomi.



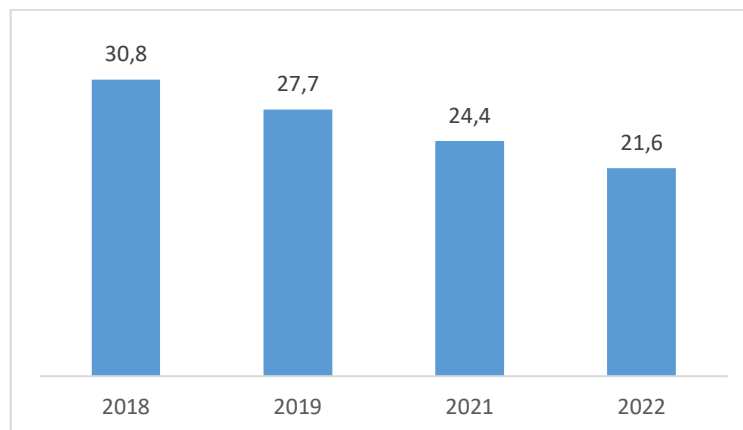
Gambar 1.1 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2023)

Salah satu sektor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah sektor kesehatan, karena untuk mewujudkan pembangunan nasional yang menghasilkan kualitas kesehatan sumber daya manusia dan mempengaruhi ekonomi maupun lingkungan sosial (Balitbangkes Kemenkes RI, 2014). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia bersinergi dalam pembuatan kebijakan kesehatan hingga mengimplementasikan dalam bentuk berbagai program (Massie, 2009). Pengelolaan kesehatan di Indonesia dilaksanakan secara otonomi, artinya pemerintah pusat memberi kewenangan terhadap pemerintah dibawahnya untuk mengatur segala sistem kesehatan. Bentuk tindakan dalam mengatur masyarakat agar mewujudkan kesejahteraan, maka otonomi sebagai tolak ukur dalam pembangunan berkelanjutan (Kholik, 2020). Seperti yang tercantum pada (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Kesehatan, 2023), bahwasanya pengelolaan kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang dilakukan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Permasalahan kesehatan di Indonesia hingga tahun 2023 masih cukup menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dan tenaga kesehatan, contohnya masalah kesehatan yang belum terselesaikan secara tuntas adalah masalah stunting, masalah kesehatan yang menyerang anak-anak kecil yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan yang tidak mencapai standar tinggi badan yang telah ditetapkan sesuai usia. Kondisi stunting pada anak dapat terjadi pertumbuhan yang terhambat dan gangguan kesehatan, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan ketidaksesuaian konsumsi makanan sesuai usia (Rahmadhita, 2020). Selain itu, penyebab stunting juga berasal dari kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan dan pola makan mulai dari dalam kandungan hingga lahir (Anwar et al., 2022).

Menurut Kementerian Kesehatan, bahwasanya angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6% yang dimana terjadi penurunan, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 24,4%. Meninjau hasil penurunan stunting tersebut, Pemerintah Indonesia bersinergi dan menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa akan dilakukan pengukuran Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menjadi satu kali dalam satu tahun, yang sebelumnya dilakukan satu kali dalam tiga tahun (Tarmizi, 2023).



Gambar 1.2 Prevalensi Angka Stunting di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: databoks (2023)

Angka stunting secara nasional dilatarbelakangi oleh hasil dari besaran kasus stunting di setiap daerah atau provinsi. Menurut Kementerian Kesehatan, Provinsi di Indonesia yang berhasil mengalami penurunan angka stunting hingga tahun 2022 adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Diantara lima provinsi tersebut, Provinsi Jawa timur yang memiliki angka stunting paling rendah dan berada dibawah persentase angka stunting nasional, sebesar 19,2% (Ali, 2023).

Tabel 1.1 Prevalensi Angka Stunting di Indonesia Tahun 2022

No	Provinsi	Angka Stunting (%)
1	Jawa Timur	19,2%
2	Banten	20%
3	Jawa Barat	20,2%
4	Jawa Tengah	20,8%
5	Sumatera Utara	21,1%

Sumber: Databoks (2023), diolah penulis

Provinsi Jawa Timur dengan angka stunting sebesar 19,2% akan tetap menjadi perhatian ketat pemerintah daerah agar pada tahun selanjutnya tidak terjadi kenaikan angka stunting. Namun, meskipun persentase pada Tahun 2022 sudah dikatakan rendah, Jawa Timur mempunyai populasi yang besar. Beberapa faktor terjadinya stunting di Jawa Timur sebagian besar disebabkan oleh masalah kesehatan pada ibu, bayi, dan remaja, serta minimnya pengetahuan kader kesehatan di setiap kabupaten atau kota. Selain itu, minimnya alat kesehatan dan kurang meratanya alat-alat di berbagai puskesmas maupun posyandu, hal ini terjadi di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso (Novrizaldi, 2023). Pengoptimalan program-program untuk penurunan angka stunting sebagai salah satu cara meningkatkan kesehatan para anak-anak, Gubernur Khofiah mengatakan bahwa kerjasama antara beberapa *stakeholder* yang terlibat seperti pemerintah daerah, aktor swasta, lembaga-lembaga bidang kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat sebagai kekuatan yang sangat besar dalam upaya penurunan angka stunting di Jawa Timur (Bakorwil, 2023).

Akan tetapi, salah satu kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Sidoarjo justru mengalami kenaikan pada angka stunting, pada Tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Sidoarjo turun jauh dari tahun sebelumnya, yang dimana hal tersebut dapat dikatakan penurunan yang signifikan. Namun, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 1,3%, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Fenny Apridawati selaku Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo (Rifai, 2023).

Tabel 1.2 Angka Stunting di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020-2023

No	Tahun	Angka Stunting (%)
1	2020	23%
2	2021	14,8%
3	2022	16,1%
4	2023	13,7%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (2023)

Beberapa faktor yang melatarbelakangi penyakit stunting pada anak ini berbagai macam bentuk, masalah gizi yang buruk sebagai faktor terkuat yang menyebabkan stunting pada anak. Namun, faktor yang berasal dari lingkungan juga sebagai penyebab stunting yang ditandai dengan lingkungan yang tidak bersih dan mudah mencemari, salah satu pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan balita adalah sanitasi air yang buruk, karena hal ini dapat menyebabkan balita dengan mudah terserang penyakit diare yang dapat menyerang pada kondisi gizi untuk pertumbuhan anak (Rahmuniyati & Sahayati, 2021).

Sanitasi air yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tindakan Buang Air Besar (BAB) sembarangan, kualitas air minum yang buruk, kurangnya pengetahuan mengenai cuci tangan, penanganan sampah rumah tangga dan limbah cair rumah tangga yang buruk (Maryani & Mandagi, 2023). Oleh karena itu, pada Tahun 2023 pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo bersinergi untuk memperkuat dalam percepatan penanganan stunting melalui program *Open Defecation Free* (ODF) yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang didalamnya terdapat lima pilar STBM yang salah satunya adalah stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan, dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan bebas ODF sebesar 100%, (Rifai, 2023). Untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo ODF 100%, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama stakeholder lainnya yang terlibat melaksanakan pembangunan berupa jamban sehat untuk masyarakat yang belum memiliki jamban secara mandiri. Pada awal Tahun 2023, masih ada 6.696 KK yang belum memiliki jamban, penguatan program ODF menghasilkan penurunan pada akhir Tahun 2023 menjadi 5.548 KK yang belum memiliki jamban, ungkap Fenny (Aprianto, 2023). Artinya, program ODF pada Tahun 2023 berhasil menyelesaikan pembangunan jamban sebanyak 1.148 KK. Untuk mewujudkan verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS), Kabupaten Sidoarjo harus berhasil memverifikasi ODF di tingkat Kecamatan dan verifikasi desa yang telah ODF.

Dari permasalahan utama terkait meningkatnya angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, menghadirkan implementasi program percepatan pengentasan dengan melaksanakan pembangunan jamban di desa-desa yang masih tercatat melakukan Buang Air Besar (BAB) sembarangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan menyebarkan penyakit-penyakit pada masyarakat, terutama pada balita. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program ODF dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka bentuk rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo (studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo).
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo (studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo).

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti:

- a) Memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara tentang implementasi program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- b) Memberikan dorongan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti:

- a) Bagi Penulis
Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung melalui penelitian tentang implementasi program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- b) Bagi Instansi Pemerintah
Pemerintah dapat mengoptimalkan program *Open Defecation Free* (ODF) untuk mengatasi stunting secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
- c) Bagi Masyarakat
Dapat menghasilkan informasi mendalam dan kontribusi dalam keberhasilan program *Open Defecation Free* (ODF) untuk mengatasi stunting di Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat sebuah penelitian terdahulu yang didapatkan dari penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yang dimana didalam penelitiannya memiliki pembahasan yang sesuai dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)”, sehingga dapat digunakan sebagai acuan peneliti untuk memperoleh data dan mendeskripsikan beberapa perbedaan maupun persamaan yang ada di penelitian ini dan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Review	
				Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Percepatan <i>Open Defecation Free</i> (ODF) di Kelurahan Lebakgede Kota Bandung Maya Novita Sari (2022).	Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.	Di Kelurahan Lebakgede Belum ada Tim Percepatan <i>Open Defecation Free</i> (ODF) sebagai wadah komunikasi antar <i>stakeholder</i> , Pembangunan septic tank komunal terkendala pendanaan dan keterbatasan lahan, kondisi ekonomi masyarakat, masyarakat enggan membangun septic tank mandiri, belum ada keterlibatan pihak swasta dan akademisi.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai program bebas ODF dan sistem kolaborasi antar <i>stakeholder</i> .	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk mengatasi stunting, sedangkan penelitian oleh penulis bertujuan untuk mengatasi stunting Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian

No	Judul, Nama dan Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Review	
				Persamaan	Perbedaan
2	Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Jawa Timur Ilmi Jyhan Azzarrah (2021).	Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.	Di Provinsi Jawa Timur, Pelaksanaan pembangunan Jamban Sehat, terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan WC menyebabkan meningkatnya ODF pada tiap daerah. Kolaborasi <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam program ini adalah Dinas Kesehatan Jawa Timur bersama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pihak swasta seperti investasi langsung atau <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan juga peranan masyarakat.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai program pembangun jamban untuk sarana sanitisasi, dan <i>collaborative governance</i> sebagai pendukung pelaksanaan program.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk mengatasi stunting, sedangkan penelitian oleh penulis bertujuan untuk mengatasi stunting. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian
3	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Upaya Pencapaian Target Sanitasi Layak di Kota Padang	Teori yang digunakan adalah <i>Collaborative Governance</i> Metode penelitian yang	Proses <i>collaborative governance</i> dalam upaya pencapaian target sanitasi layak di Kota Padang belum optimal, dikarenakan terdapat faktor-faktor	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa sama-sama membahas mengenai sistem <i>collaborative governance</i> dalam program sarana	Perbedaan anatara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwasanya penelitian ini tidak bertujuan untuk mengtaasi stunting, sedangkan penelitian oleh penulis bertujuan

No	Judul, Nama dan Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Review	
				Persamaan	Perbedaan
	Afriyanni (2019).	digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.	penghambat kolaborasi yaitu lemahnya komitmen pemerintah daerah, ego sektoral, keterbatasan sumber daya, teknis dan data, belum jelasnya batasan kewenangan dan pembagian tugas, belum optimalnya peran swasta dan masyarakat.	sanitasi dengan pembangunan jamban	untuk mengatasi stunting. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian.
4	Implementasi Pengawasan Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan <i>Open Defecation Free</i> (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Nurlia Nurhaeda R (2021)	Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif	Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan <i>Open Defecation Free</i> (ODF) di Kelurahan Mallawa ini berdasarkan indikator teori yang digunakan, secara komunikasi sudah berjalan efektif dan efisien, sumber daya berupa finansial masih kurang, disposisi sudah terlaksana dengan baik, dan struktur birokrasi yang tersusun dengan baik. Selain itu,	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa sama-sama membahas mengenai bentuk kolaboratif stakeholder dalam program <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwasanya penelitian ini tidak bertujuan untuk mengatasi stunting, sedangkan penelitian oleh penulis bertujuan untuk mengatasi stunting. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian.

No	Judul, Nama dan Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Review	
				Persamaan	Perbedaan
			kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi ODF dan sanksi apabila melakukan buang air besar sembarangan.		
5	Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Falentina Kiranasari, dkk (2024)	Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif	berdasarkan 5 dimensi teori implementasi kebijakan publik, yaitu standar dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kecenderungan sikap pelaksana, dan upaya pemerintah daerah terhadap percepatan penurunan stunting, berada pada kriteria penilaian baik dan menghasilkan penurunan prevalensi stunting dari 38,2% menjadi 18,7%.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa sama-sama membahas peran pemerintah dalam mengatasi stunting melalui program dan kebijakan.	Perbedaan anatara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwasanya penelitian ini hanya menilai tentang implementasi kebijakan penanganan stunting oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan stakeholder lainnya, sedangkan penelitian oleh penulis lebih berfokus pada collaborative governance dalam program Open Defecation Free (ODF) untuk mengatasi stunting. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian.

No	Judul, Nama dan Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Review	
				Persamaan	Perbedaan
6	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Intervensi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)- Stunting di Desa Bayumundu Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Muh Akbar Al-Bantani, dkk (2022)	Teori yang digunakan adalah teori pengukuran efektivitas Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Berdasarkan kriteria pengukuran efektif, program intervensi STBM – stunting di Desa Bayumundu dengan indikator keberhasilan program mencapai “cukup efektif”, indikator keberhasilan sasaran mencapai “efektif”, indikator kepuasan terhadap program mencapai “efektif”, indikator tingkat input dan output mencapai “cukup efektif”, dan indikator pencapaian tujuan secara menyeluruh mencapai “efektif”.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa sama-sama membahas mengenai program sarana sanitasi dengan pembangunan jamban untuk mengatasi stunting	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwasanya penelitian ini tidak membahas mengenai sistem collaborative governance, sedangkan penelitian oleh penulis menganalisis sistem collaborative governance dalam program ODF untuk mengatasi stunting. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian.
7	Actualization of the Community-Based Total Sanitation Program (Free from Open Defecation) in Realizing	Teori yang digunakan adalah teori model aktualisasi program Metode penelitian yang digunakan	Aktualisasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Open Defecation Free) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Kota Bandung 100% ODF tidak	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa sama-sama membahas mengenai bentuk kolaboratif stakeholder dalam program <i>Open</i>	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwasanya penelitian ini tidak bertujuan untuk mengatasi stunting, sedangkan penelitian oleh penulis bertujuan

No	Judul, Nama dan Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Review	
				Persamaan	Perbedaan
	the Target of Bandung City 100% Open Defecation Free Oneng Purnamasari (2022)	adalah metode penelitian deskriptif kualitatif	berjalan secara optimal dikarenakan terdapat satu dari tiga indikator aktualisasi program yaitu indikator kapasitas sosial lembaga pelaksana terkait komunikasi program dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak berjalan efektif. Namun, target tercapai tepat waktu karena didukung oleh indikator tata kelola yang memadai dan kapasitas fisik lembaga pelaksana	<i>Defecation Free</i> (ODF).	untuk mengatasi stunting. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian.
8	Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue	Teori yang digunakan adalah teori tahapan strategi Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian	Perumusan strategi (formulasi kebijakan) penanggulangan stunting pada anak balita oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue sudah cukup baik dan terukur, dapat dilihat dari kejelasan visi, misi, tujuan,	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa sama-sama membahas mengenai bentuk kolaboratif stakeholder dalam mengatasi stunting	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwasanya penelitian ini membahas secara general program dalam mengatasi stunting, sedangkan penelitian oleh penulis menganalisis sistem collaborative governance dalam

No	Judul, Nama dan Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Review	
				Persamaan	Perbedaan
	Fatris Rudmini (2021)	deskriptif kualitatif	sasaran, dan kegiatan-kegiatan. Pelaksanaan strategi (implementasi kebijakan) yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue belum optimal karena keterbatasan dalam penyelenggaraan edukasi dan pelatihan pada tenaga kerja di Dinas Kesehatan, kader psyandu, dan puskesmas, serta keterbatasan sumber anggaran		program ODF untuk mengatasi stunting. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian.
9	The Role of the State Government, Civil Society and Programmes Across Sectors in Stunting Reduction in Chattisgarh, India, 2006-2016. Neha Kohli, dkk. (2020)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (<i>mixed methods</i>) yaitu kualitatif dan kuantitatif	Berkurangnya angka stunting pada anak-anak di Chattisgarsh terlihat pada anak-anak usia 6-59 bulan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penurunan gizi buruk pada anak, perubahan layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik, rumah tangga aset, dan kebersihan sanitasi. Hal ini juga didukung	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah sama-sama membahas program untuk mengatasi stunting berupa kebersihan sanitasi yang melibatkan beberapa <i>stakeholder</i> .	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa pada penelitian ini tidak membahas mengenai konsep <i>collaborative governance</i> , sedangkan penelitian oleh penulis mengaitkan konsep <i>collaborative governance</i> dalam program penanganan stunting

No	Judul, Nama dan Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Review	
				Persamaan	Perbedaan
			dengan adanya kolaborasi kepemimpinan birokrasi dan pemerintah yang cakap, mitra pembangunan, masyarakat sipil, dan keterlibat komunitas swasta.		
10	Progress in Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Coverage and Potential Contribution to the Decline in Diarrhea and Stunting in Ethiopia Meron Girma, dkk. (2021)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (<i>mixed methods</i>) yaitu kualitatif dan kuantitatif	Kemajuan dalam praktik WASH antara tahun 2000 hingga tahun 2016 di Ethiopia mengalami penurunan dalam hal penyakit diare dan stunting pada anak usia dibawah 5 tahun. Meskipun kemajuan telah tercapai, nyatanya masih ada kesenjangan cakupan WASH antara masyarakat kaya dan pinggiran kota, sehingga perlu mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan standar WASH dan mengatasi kesenjangan tersebut	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai program pemerintah dalam mengatasi stunting yang berupa pembangunan jamban, yang sesuai dengan konsep <i>Open Defecation Free</i> (ODF) untuk mengatasi stunting	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa pada penelitian ini tidak membahas mengenai kolaborasi <i>stakeholder</i> yang ditandai masih adanya kesenjangan cakupan program WASH, sedangkan penelitian oleh penulis mengaitkan konsep <i>collaborative governance</i> dalam program ODF untuk penanganan stunting.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan menurut James E. Anderson dalam (Suwitri, 2008) bahwasanya kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai suatu tujuan yang direncanakan dan dilaksanakan seorang atau sekelompok pelaku yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut James E. Anderson, kebijakan merupakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Carl J. Friedrich, kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi tertentu yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah, serta dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan (Tjilen, 2019). Kebijakan publik meliputi aspek-aspek dan proses yang melekat, seperti formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk membentuk sebuah pencapaian dari kebijakan tersebut (Hayat, 2018).

Dalam (Suwitri, 2008), kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh James E. Anderson bahwasanya “kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.” Sedangkan menurut pandangan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky bahwasanya “kebijakan publik apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.” Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh David Easton bahwasanya “kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.” Dan kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, implementasi kebijakan juga merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirancang dan dirumuskan, sehingga tanpa adanya implementasi maka suatu kebijakan tersebut akan sia-sia dan tidak akan dapat menyelesaikan sebuah masalah di kelompok sasaran atau masyarakat.

Menurut Edwards III (1980), implementasi dipandang sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan yang dimana tahapan tersebut berupa tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau implikasi (output dan outcome) yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut.

Beberapa para ahli memberikan pandangan dan model terkait implementasi kebijakan, dalam buku (Subarsono, 2005), seperti:

- 1) Teori George C. Edward III

Pandangan oleh Edward III yakni sebagai berikut:

- a. Komunikasi
Komunikasi dalam implementasi kebijakan digunakan sebagai alat untuk penyaluran dan penyampaian informasi oleh implementator yang harus ditransmisikan kepada kelompok guna memberikan kejelasan terkait tujuan dan sasaran.
 - b. Sumberdaya
Sumberdaya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan, beberapa sumberdaya yang terlibat adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif.
 - c. Disposisi
Didalam disposisi mencakup terkait watak dan karakteristik implementator, karena hal tersebut berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik.
 - d. Struktur birokrasi
Struktur organisasi sebagai susunan yang bertugas dalam implementasi kebijakan, salah satu aspek struktur birokrasi tersebut adalah *Standar Operating Procedur* (SOP) yang digunakan sebagai pedoman oleh implementator dalam proses implementasi kebijakan.
- 2) Donald Van Meter dan Van Horn
- Pandangan oleh Donald Van Meter dan Van Horn mencakup lima variabel, yaitu sebagai berikut:
- a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dalam implementasi kebijakan yang dimaksud adalah rincian diadakannya kebijakan yang berupa dokumen yang harus jelas dan terukur, agar tidak terjadi konflik antara para implementator.
 - b. Sumberdaya
Implementasi kebijakan didukung dengan penguatan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia.
 - c. Hubungan antar organisasi
Dalam implementasi suatu kebijakan harus melibatkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain guna untuk keberhasilan suatu program yang diimplementasikan.
 - d. Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik yang dimaksud adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang nantinya mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program.
 - e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
Dalam variabel ini, mencakup sumberdaya lingkungan sosial yang dapat dinilai sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan mempengaruhi kondisi ekonomi, serta elite politik memberikan dukungan dan partisipasi dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan dan program.

2.2.3 Implementasi Program

Definisi program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dilanjutkan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan (Aprillia et al., 2021). Menurut David C. Korten bahwasanya implementasi program adalah kesesuaian implementasi kebijakan, sedangkan menurut Charles O. Jones bahwasanya implementasi program adalah salah satu komponen dalam suatu kebijakan.

Menurut Hugwood dan Gunn dalam (Hayat, 2018), bahwasanya suatu kebijakan sebagai program (*as programme*), yang artinya program-program oleh pemerintah merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik. Suatu program dihasilkan dari sebuah rencana yang bertujuan untuk pembangunan pemerintah dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk kepentingan masyarakat dan membangun sinergi dalam tata kelola pemerintah yang baik.

Sehingga, implementasi program adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang didasari berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang ditetapkan secara efektif agar mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada kelompok sasaran suatu program (Aprillia et al., 2021).

Beberapa para ahli memiliki pandangan dan model dalam implementasi program, yaitu sebagai berikut:

1) David C. Korten

Model implementasi oleh David C. Korten dalam (Tarigan, n.d.) berkaitan dengan kesesuaian antara tiga elemen, suatu program dapat dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu:

- a. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, artinya kesesuaian antara apa yang ditawarkan dalam bentuk program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, artinya kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, artinya kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

2) Charles O. Jones (1996)

Dalam melaksanakan aktivitas implementasi program, Charles menyebutkan bahwasanya terdapat tiga pilar yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Organization (Organisasi)

Dalam sebuah implementasi program, organisasi sebagai wadah tersusunnya pembentukan atau penataan suatu program. Beberapa unsur yang terkandung didalamnya meliputi sumberdaya, unit, dan perangkat hukum. Unsur sumberdaya terbagi menjadi tiga, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya finansial atau keuangan, dan sumberdaya sarana dan prasarana. Unsur unit berkaitan dengan struktur organisasi yang dimana masing-masing stakeholder yang terlibat mempunyai pembagian tugas masing-masing.

b. Interpretasi

Dalam sebuah implementasi program, pemahaman terkait rencana atau pembentukan program harus mampu memberikan aktivitas penjelasan yang mudah dipahami oleh pelaku implementasi program dan sasaran program. Dalam pemahaman tersebut, dapat dilihat dengan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis.

c. Application (Penerapan)

Implementasi program yang telah dirumuskan dengan peraturan, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis berjalan sesuai dengan ketentuan, yang selanjutnya harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja yang telah terprogram dan terencana dengan baik, serta jadwal kegiatan program yang sudah tersusun dari kapan dimulai dan diakhiri agar mudah dalam mengadakan evaluasi.

2.2.4 Program *Open Defecation Free* (ODF)

Open Defecation Free (ODF) berhubungan dengan sanitasi atau upaya dalam menjaga kesehatan lingkungan yang dimana isu ketersediaan air bersih menjadi perhatian pemerintah, hal tersebut ditandai karena masih banyaknya sumber air yang tercemar oleh limbah tinja, sehingga menimbulkan penyakit seperti diare dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah sebagai perwujudan kesehatan masyarakat tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

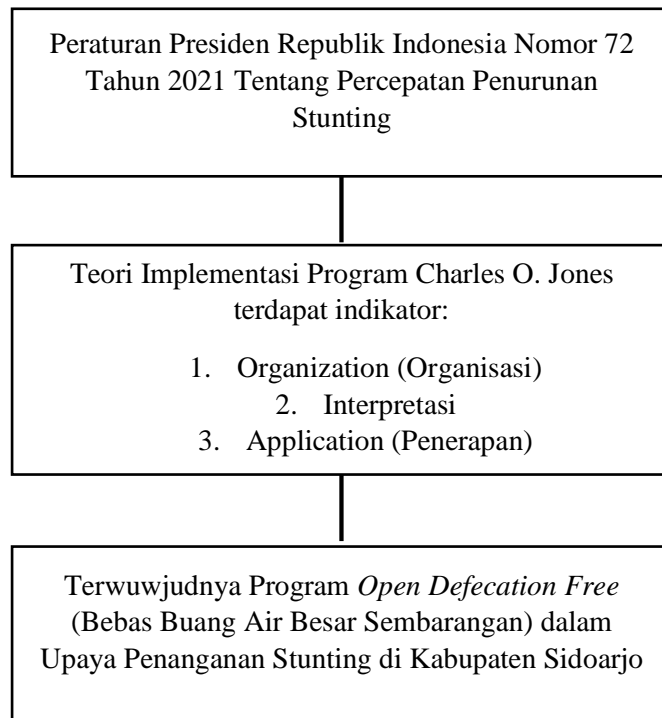
Pemerintah dalam mengatasi sanitasi buruk tersebut dengan mengimplementasikan program *Open Defecation Free* (ODF) di setiap desa, artinya pembangunan jamban sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat yang belum memiliki jamban. Karena, kelemahan pola pikir masyarakat yang masih sebagai penyebab belum dibangunnya jamban secara mandiri, hal tersebut didasari oleh anggapan masyarakat mengenai perlunya biaya yang mahal dan belum optimalnya pengetahuan mengenai kultur hidup bersih dan sehat (Asyary, 2022).

Untuk terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal, maka program *Open Defecation Free* (ODF) dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan cara diadakannya pemantauan dan evaluasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, bahwasanya tahapan pemantauan dan evaluasi diselenggarakannya STBM adalah meliputi pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data dan informasi, pelaporan dan pemberian umpan balik. Adapun indikator suatu desa atau kelurahan dikatakan telah mencapai status Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) adalah:

- 1) Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja atau kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat.
- 2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
- 3) Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarangan tempat.
- 4) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat.
- 5) Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan fokus dari penelitian yang akan penulis teliti dengan judul “Implementasi Program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)”, dan kerangka konseptual tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah Penulis (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini yang berjudul “Implementasi Program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)” menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan masalah secara sistematis. Menurut (Abdussamad, 2021), jenis penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengarah pada fenomena atau masalah yang terjadi secara alami dan sesuai dengan realita

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah:

- 1) Karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti berusaha menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai Implementasi Program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo).
- 2) Jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif yang digunakan oleh peneliti menggunakan sumber data yang didapat berdasarkan sudut pandang para informan yang sesuai dengan fokus penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian, fokus penelitian harus diterapkan guna membatasi suatu pembahasan agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang keluar dari konteks, tujuannya guna menghasilkan penelitian yang jelas, terperinci, dan terarah. Pada penelitian ini yang berjudul “Implementasi Program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)” yang berdasarkan kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka fokus penelitiannya mengacu pada teori model implementasi program oleh Charles O. Jones, yaitu:

- a. Organization (Organisasi)
Dalam organisasi akan membahas mengenai sumberdaya, unit, dan perangkat hukum. Sumberdaya terbagi menjadi tiga, yaitu sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi program *Open Defecation Free*, sumberdaya finansial atau keuangan, dan sumberdaya sarana dan prasarana. Serta menjelaskan struktur organisasi dalam implementasi program *Open Defecation Free* yang dimana masing-masing *stakeholder* yang terlibat mempunyai pembagian tugas masing-masing.
- b. Interpretasi
Dalam interpretasi akan membahas terkait implementasi program mampu memberikan aktivitas penjelasan yang mudah dipahami oleh pelaku implementasi program dan sasaran program. Serta menjelaskan implementasi program *Open Defecation Free* sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis.
- c. Application (Penerapan)
Dalam penerapan akan membahas mengenai implementasi program *Open Defecation Free* dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja yang telah terprogram dan

terencana dengan baik, serta jadwal kegiatan program yang sudah tersusun dari kapan dimulai dan diakhiri.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai bentuk para peneliti untuk mendapatkan suatu data guna mendukung penelitian. Pada penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No. 46, Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

3.4 Sumber Data

Data merupakan bagian terpenting yang harus diperoleh seorang peneliti dalam jenis penelitian berbentuk kualitatif, maka sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa para informan yang sesuai dengan fokus penelitian. Menurut (J. Moleong, 2014), didalam penelitian kualitatif terdapat sumber data berupa data primer dan data sekunder. Maka, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer wawancara

Data primer atau merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para informan yang menghasilkan kata-kata, maka data yang diperoleh berasal dari kegiatan wawancara secara langsung dan observasi di lapangan atau lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa:

- 1) Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Hasil wawancara dengan pihak masyarakat yang telah mendapatkan program *Open Defecation Free* berupa pembangunan jamban sekaligus anggota keluarga yang terindikasi stunting.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang artinya tidak terjun di lapangan secara langsung. Melainkan, diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan implementasi program *Open Defecation Free* dalam upaya penanganan stunting yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi, dokumen tersebut berupa data kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan stunting, jurnal atau penelitian terdahulu, dan buku tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan implementasi program. Selain itu, penggunaan media massa untuk memperoleh data, seperti artikel dan berita yang aktual.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, penggunaan sumber data yang berbentuk data primer yang mempunyai komponen dalam menggali data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung di lapangan dengan penggunaan pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti terhadap responden atau para informan yang dilaksanakan secara tatap muka dan lisan sesuai dengan pembahasan yang akan dibangun. Pada kegiatan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk pengumpulan data yang terperinci dan terarah sesuai dengan fokus penelitian.

Pihak informan yang terlibat dalam kegiatan wawancara untuk penelitian yang berjudul “Implementasi Program *Open Defecation Free* (Bebas Buang Air Besar Sembarangan) dalam

Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)” adalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat yang telah mendapatkan program *Open Defecation Free* berupa pembangunan jamban sekaligus anggota keluarga yang terindikasi stunting.

b. Observasi

Kegiatan observasi atau biasa disebut dengan pengamatan suatu objek digunakan dalam pengumpulan data, yang dimana dalam kegiatan observasi juga melaksanakan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati masalah yang terjadi secara langsung dan tertera pada berita massa yang nantinya akan dihubungkan dengan pengetahuan atau teori yang dimiliki oleh peneliti.

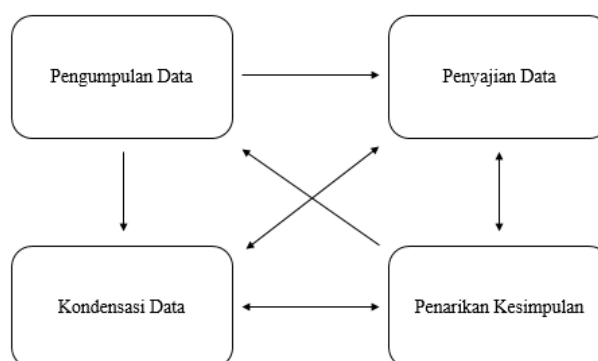
Peneliti melakukan observasi dengan mendatangi secara langsung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan tempat tinggal masyarakat yang telah mendapatkan program *Open Defecation Free* berupa pembangunan jamban sekaligus anggota keluarga yang terindikasi stunting.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi, dalam penelitian ini melakukan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen kebijakan perepatan penanganan stunting, laporan arsip dokumen mengenai implementasi program *open defecation free* (bebas buang air besar sembarangan) dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, maka tahap selanjutnya dapat dilakukan teknik analisis data. Menurut (Abdul, 2020), analisis data dalam penelitian kualitatif adalah tahapan yang merujuk pada pengelolaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, pengelolaan data tersebut disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah dalam menyampaikan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pandangan oleh B. Milles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut B. Milles, Huberman, dan Saldana
Sumber: B. Milles, Huberman, dan Saldana (2014)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan fokus penelitian untuk mempermudah memproses data. Data yang dikumpulkan didapatkan dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan seperti observasi dan wawancara difokuskan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok atau penting secara terperinci. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara untuk dilakukan reduksi data adalah hasil wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian yang tertera pada pedoman wawancara, yang meliputi: Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan.

c. Penyajian data

Dalam tahap penyajian data, hal pertama kali yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mendeskripsikan data yang diperoleh yang selanjutnya diuraikan yang didalamnya mencakup hubungan antar data, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan. Yang disajikan yang relevan. Pada penelitian ini, data yang telah direduksi akan disajikan sesuai dengan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu meliputi: Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan.

d. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan, berasal dari tahap reduksi data hingga penyajian data, yang selanjutnya peneliti dapat memverifikasi data-data dengan permasalahan yang ada, kesimpulan awal akan bersifat sementara dan akan mengalami perubahan selama pengumpulan data masih berlangsung yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat final.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Ali, F. (2023). *Angka Stunting Tahun 2022 Turun Menjadi 21,6 Persen*. BKKP Kemenkes RI. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/angka-stunting-tahun-2022-turun-menjadi-216-persen/#:~:text=Dalam kesempatan yang sama saat,%2C6%25 di tahun 2022>
- Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022). Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab Dan Dampak Stunting Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 88. <https://doi.org/10.32831/jik.v11i1.445>
- Aprianto, D. N. (2023). *Kasus Stunting di Sidoarjo Turun 2,4 persen*. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/013263259/kasus-stunting-di-sidoarjo-turun-24-persen>
- Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 202–212. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1897>
- Asyary, A. (2022). *OPEN DEFECATION FREE (ODF): PENGELOLAAN RISIKO PENYAKIT BERBASIS PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN*. UI Publishing.
- Bakorwil. (2023). *Angka Prevalensi Stunting Jawa Timur Tahun 2022 dibawah Standar WHO*. Bakorwil Bojonegoro. <https://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id/angka-prevalensi-stunting-jawa-timur-tahun-2022-di-bawah-standar-who/#:~:text=Ketua Tim Penggerak PKK Jawa,di angka 19%2C2%25>
- Balitbangkes Kemenkes RI. (2014). Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) 2013. In *Kemenkes RI*.
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September 2018*, 1–121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>
- Maryani, F. R., & Mandagi, A. M. (2023). Hubungan Sanitasi Lingkungan Dan Kualitas Air Dengan Kejadian Stunting: Systematic Review. *Prepotif ...*, 7(April). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/12474%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/download/12474/10756>
- Massie, R. (2009). Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis Dan Penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 12(4), 409–417.
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386>
- Novrizaldi. (2023). *Meski Turun Tajam, Jatim Jadi Perhatian Utama Stunting dan Kemiskinan Ekstrem*. KEMENKO PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/meski-turun-tajam-jatim-jadi-perhatian-utama-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Rahmuniyati, M. E., & Sahayati, S. (2021). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

- (Stbm) Untuk Mengurangi Kasus Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 80–95.
<https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i1.1235>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 16 (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2023>
- Rifai, A. (2023). *Sidoarjo Targetkan Bebas ODF 100 Persen*. Antara News.
<https://jatim.antaranews.com/berita/704007/sidoarjo-targetkan-bebas-odf-100-persen>
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.
- Tarigan, H. A. dan A. (n.d.). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*.
- Tarmizi, S. N. (2023). *Prevelensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. Kemenkes RI.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Nusa Media.